

**KEIKUTSERTAAN CAMAT SELAKU ADMINISTRATOR
KECAMATAN DALAM MENDORONG MASYARAKAT
UNTUK BERPARTISIPASI AKTIF TERHADAP
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DI
KECAMATAN GEUMPANG
KABUPATEN PIDIE**

Edi Saputra⁽¹⁾ Halimah⁽²⁾ Anwar⁽³⁾

Ilmu Administrasi Negara Universitas Jabal Ghafur Sigli⁽¹²³⁾

e-mail: edisaputrap86.pidie@gmail.com, halima@unigha.ac.id, anwar@unigha.ac.id

ABSTRACT

In an effort to improve development at the sub-district level, the first person who plays a very important role and has a big contribution is the Camat and the Gampong Government itself. Various efforts have been made by the Camat in implementing and improving governance and development. However, the Camat has not fully played a role in increasing development in Geumpang District due to various inhibiting factors. The purpose of this research was to find out the role of the Camat as an administrator in order to increase development in Geumpang District and the obstacles encountered in increasing community participation in development programs. This research uses descriptive method. To obtain data besides conducting field research also using library research. All data obtained was processed and analyzed using qualitative methods. From the results of the study it was found that the Camat as administrator had not fully played a role in increasing development in the Geumpang District. Obstacles encountered include that the Camat does not use informal channels in conveying information to the community, the community is not consulted in planning and implementing development and the level of community awareness in development is still low. It is recommended that the Camat improve the techniques and forms of communication used, more listening to the inspirations and aspirations that are developing in the community, it is necessary to provide detailed counseling to the community about the importance of development so that the development carried out receives full support and participation from the community.

Keywords: District Head, Administrator, Community

ABSTRAK

Dalam usaha meningkatkan pembangunan ditingkat Kecamatan orang yang pertama sangat berperan dan mempunyai andil besar adalah Camat dan Pemerintah Gampong itu sendiri, Berbagai usaha telah dilakukan Camat dalam pelaksanaan dan peningkatan pemerintahan dan pembangunan, Camat juga bisa berkomunikasi langsung dengan seluruh Perangkat Gampong dan masyarakat yang ada diwilayah kerjanya, Namun semua itu Camat belum berperan sepenuhnya dalam rangka peningkatan pembangunan di Kecamatan Geumpang dikarenakan ditemui berbagai faktor penghambat. Tujuan dilakukan penelitian adalah untuk mengetahui Peranan Camat sebagai administrator dalam rangka peningkatan pembangunan di Kecamatan Geumpang dan hambatan-hambatan yang ditemui dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap program-program pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Untuk memperoleh data disamping melakukan penelitian lapangan juga menggunakan penelitian kepustakaan. Semua data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan

menggunakan metode kualitatif. Dari hasil penelitian ditemui bahwa Camat sebagai administrator belum sepenuhnya berperan dalam peningkatan pembangunan di Kecamatan Geumpang. Hambatan-Hambatan Yang ditemui antara lain adalah Camat kurang menggunakan jalur informal dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat, masyarakat kurang dimintai pendapat dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dan tingkat kesadaran masyarakat dalam pembangunan masih rendah. Disarankan agar Camat lebih meningkatkan teknik dan bentuk komunikasi yang digunakan, lebih mendengarkan inspirasi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, hendaknya perlu diberikan penyuluhan secara mendetil kepada masyarakat tentang pentingnya pembangunan sehingga pembangunan yang dilaksanakan mendapat dukungan dan partisipasi penuh dari masyarakat.

Kata Kunci: *Camat, Administrator, Masyarakat*

1. Pendahuluan

Sebagaimana di ketahui bahwa Negara Indonesia adalah masih merupakan negara berkembang, maka pembangunan, perlu terus ditingkatkan, dan oleh karena itu maka pembangunan merupakan suatu kegiatan yang dilaksanakan secara sadar serta kontinue oleh pemerintah dalam mencapai tingkat kehidupan yang lebih baik, maju dan mapan. Sehingga dapat memungkin taraf hidup yang lebih layak bagi masyarakatnya. Pelaksanaan pembangunan diharapkan untuk mewujudkan hal tersebut dapat menyentuh kesemua tingkat dan kepentingan masyarakat yang universal, banyak faktor yang mempengaruhinya, yang diantaranya seperti manajemen dalam pelaksanaan pembangunan itu sendiri, dalam mendemonstrasikan berbagai hal yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan pembangunan terutama menyangkut perencanaan, pengawasan dan teknik pelaksanaan serta sistem komunikasi dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dimana pembangunan itu dilaksanakan.

Disamping itu kemampuan Pimpinan perlu dimiliki, dan juga faktor peran aktif masyarakatpun sangatlah menentukan berhasil atau tidaknya kegiatan-kegiatan pembangunan yang dilaksanakan terlebih-lebih yang diarahkan ke tingkat paling rendah yaitu gampong. Tanpa dukungan

atau partisipasi masyarakat secara nyata dalam proses pelaksanaan pembangunan sangat besar kemungkinan pembangunan yang dimaksudkan tidak berjalan lancar dan tidak mencapai sasaran ataupun target sebagaimana yang diharapkan. Apabila hal ini dapat terjadi, akan memberikan dampak negatif terhadap proses pertumbuhan dan dinamika pembangunan, yang dewasa ini semakin giat dilaksanakan disetiap daerah diseluruh tanah air Indonesia.

Usaha-usaha untuk memajukan pembangunan ditingkat Kecamatan, orang yang paling berperan dan mempunyai andil yang lebih besar adalah Camat dan pemerintah gampong (Keuchik) itu sendiri, dimana untuk menjalankan roda organisasi ke pemerintahannya di dalam melaksanakan pembangunan yang diinginkan lebih lancar ataupun dapat berjalan. Namun kalau dilihat semua kegiatan Kecamatan tertumpu dan berada di setiap gampong, oleh karenanya berbagai upaya telah dilakukan oleh Camat untuk melaksanakan dan meningkatkan baik pemerintahan atau pembangunan di gampong-gampong dimana ia bertugas, dan seorang Camat juga bisa berkomunikasi langsung dengan seluruh perangkat gampong serta masyarakat didalamnya yang ada dalam wilayah kerjanya.

Fungsi Camat sebagai administrator, fasilitator dan sebagai komunikator di Kecamatan yang senantiasa berperan aktif didalam memajukan serta meningkatkan berbagai macam penyelenggaraan pemerintah di tingkat gampong.

Rumusan masalah:

Camat belum sepenuhnya berhasil dalam upaya peningkatan partisipasi masyarakatnya untuk pembangunan pemerintahan gampong, dikarenakan ditemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya, dan sehingga dapat dirumuskan pula permasalahannya:

1. Apakah Camat selaku administrator, fasilitator dan sebagai komunikator Kecamatan telah berperan sepenuhnya dalam mendorong masyarakatnya untuk berpartisipasi aktif terhadap proses pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie?
2. Faktor apa saja yang menyebabkan sehingga Camat belum sepenuhnya berperan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan?
3. Hal apa saja yang dapat dilakukan untuk menanggulangnya?

2. Studi Literatur Pengertian Peran

Sehubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam penulisan skripsi ini yang menyangkut dengan peranan Camat selaku administrator Kecamatan dalam mendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif terhadap pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Geumpang Kabupaten Pidie, Jadi perlu adanya penjelasan secara teoritis tentang pengertian peranan itu sendiri. Peranan menurut pendapat WJS. Poerwadarminta (2012: 667), adalah: “seperangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat”.

Dari pengertian peranan seperti yang telah disebutkan diatas, maka dapat dikatakan bahwa peranan Camat adalah merupakan tingkat kemampuan yang diharapkan dimiliki oleh Camat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan, dengan berdasarkan kepada tingkat kemampuan

yang dimiliki oleh Camat serta didukung berbagai sarana dan prasarana yang dimiliki sehingga tugas-tugas yang dilaksanakan dan dijalankannya dapat tercapai sebagaimana mestinya. Istilah lain untuk kata peranan menurut pendapat H.Lisma Jamal (2012: 47), “yang dimaksud dengan peranan atau rol ialah tingkah laku yang diharapkan dari seseorang pada situasi tertentu”. Hal ini dapat diberikan pengertian bahwa peranan adalah kenyataan yang lahir dari tingkah laku manusia/seseorang yang sehubungan dengan tugas-tugasnya yang harus dikerjakan dan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan PerUndang-Undangan yang berlaku dan berdasarkan tanggung jawabnya pula.

Selanjutnya dalam Sinopsis (2011: 4), mengemukakan tentang pengertian peranan adalah merupakan “Tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain terhadap seseorang sesuai dengan kedudukannya dalam suatu sistem yang sesuai dengan peranannya, maka tingkah laku yang diharapkan oleh orang lain sesuai dengan kedudukannya”. Dari pendapat ini, maka peranan dapat disebut juga sebagai suatu proses yang dilakukan dalam menggunakan metode yang sistematis dan dilakukan oleh orang-orang yang profesional dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang telah dibebankan kepadanya

Camat

Menurut pendapat Bayu Suryaningrat (2010: 53), menyebutkan bahwa “Camat merupakan salah satu mata rantai dari dekonsentrasi, ia adalah pemimpin di Kecamatan”. Oleh karena itu berdasarkan pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh disebutkan bahwa dalam pelaksanaan tugasnya kepemimpinan Camat memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan Pemerintahan Kabupaten atau Kota.

Dengan demikian dapat disimpulkan juga bahwa Camat pemimpin Kecamatan

yang diberi tugas, hak dan wewenang untuk menjalankan segala urusan pemerintahan dan pembangunan serta membina kehidupan masyarakat yang ada dalam Kecamatan yang dipimpinnya. Dengan kata lain disebutkan Camat sebagai administrator, dinamisator, stabilisator dan katalisator ditingkat Kecamatan yang mempunyai peluang besar atau andil besar untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara pemerintah dan masyarakat.

Camat sebagaimana yang dikatakan bahwa pimpinan ditingkat Kecamatan yang merupakan perpanjangan tangan Pemerintahan Kabupaten yang juga dapat menjalankan tugas-tugas pemerintahannya dengan efektif dan efisien dan pembangunan serta kehidupan masyarakat yang lebih baik ataupun sejahtera dalam segi keamanan dan sebagainya. Pemerintah Kecamatan adalah merupakan salah satu tingkat pemerintah yang dalam struktur organisasi Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dipimpin oleh seorang pimpinan Kecamatan yang disebut dengan Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota.

Adapun fungsi Camat selaku administrator Kecamatan sebagaimana dikemukakan Bayu Suryaningrat (2010: 14), yang antara lain:

1. Pengelolaan administrasi umum meliputi pekerjaan ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, organisasi dan ketatalaksanaan Kecamatan,
2. Penyusunan program kerja tahunan, jangka menengah dan panjang,
3. Pengordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat,
4. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum,
5. Pengordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan,

6. Pengordinasian pemeliharaan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan umum,
7. Pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Mukim dan Gampong,
8. Pembinaan terhadap pemerintah gampong yang merupakan salah satu fungsi utama yang perlu dilaksanakan oleh pemerintah Kecamatan.

Oleh karenanya keberhasilan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan ditingkat gampong, akan menjadi suatu tolak ukur bagi keberhasilan pemerintahan dan pembangunan ditingkat pemerintahan yang lebih tinggi seperti ditingkat Kecamatan, Kabupaten dan bahkan ditingkat Nasional.

Camat sebagai wakil pemerintah ditingkat Kecamatan adalah penguasa tunggal dibidang pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan dalam kecamatan dimana Camat tersebut bertugas, dengan tugas pokoknya adalah memimpin pemerintahan, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan kemasyarakatan. Dari uraian diatas, dapat dikatakan bahwa Camat adalah pemimpin atau Kepala Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang diberi wewenang, tugas dan fungsi untuk menjalankan segala urusan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kehidupan masyarakat.

Dengan kata lain disebutkan bahwa Camat sebagai administrator, dinamisator dan stabilisator ditingkat Kecamatan yang mempunyai peluang besar untuk menciptakan hubungan harmonis antara pemerintah dan masyarakat. Sesuai dengan pasal 18 ayat (5) Undang-Undang Dasar 1945, pemerintah daerah diwajibkan melaksanakan azas desentralisasi dan dekonsentrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Peranan Camat sebagai pucuk pimpinan pemerintahan ditingkat Kecamatan, maka disyaratkan kepadanya harus memenuhi kriteria-kriteria seorang pemimpin.

Camat dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya

bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Kecamatan dalam melaksanakan tugas-tugasnya bertanggung jawab penuh kepada Camat. Dari uraian ini dapat dikatakan bahwa Camat adalah pemimpin atau Kepala Pemerintahan di tingkat Kecamatan yang diberi wewenang, tugas dan fungsi oleh Bupati/Walikota untuk menjalankan segala urusan pemerintahan dan pembangunan serta pembinaan kehidupan masyarakat.

Syarat-syarat seorang pemimpin sebagaimana dikemukakan Sondang P. Siagian (2011: 13), yaitu:

1. Pendidikan umum yang meluas,

Dengan mempunyai pendidikan umum yang luas tidak usah dan tidak perlu diidentikkan dengan pendidikan tinggi dan pemilihan gelar kesarjana, yang penting adalah seorang pemimpin yang baik adalah seorang generalis yang baik pula, oleh karena itu sebagai seorang generalis ia akan mempunyai kemampuan untuk mengembangkan ketrampilan dibidang manajemennya. Yang dituntut oleh tugasnya dan tidak perlu menjadi seorang spesialis dengan pendidikan ketrampilan teknik, namun demikian dalam hal tersebut tentunya diperlukan pendidikan yang sangat tinggi agar nantinya lebih berkemampuan didalam melaksanakan atau menjalankan organisasi atau pemerintahan yang luas dan bijak didalam membangun pembangunan yang tentunya.

2. Kemampuan berkembang secara mental,

Secara filosofis dapat dikatakan bahwa suatu organisasi yang hidup akan diperlukan kemampuan yaitu mental yang baik untuk menunjang apa yang diinginkannya, jika berhenti bertumbuh berarti sudah mulai dengan proses kematiannya. Demikian juga dengan seseorang, termasuk pemimpin yang jika tidak terus bertumbuh secara mental

sesungguhnya telah mulai dengan proses snonasi dalam kehidupan kepemimpinannya.

3. Kreatif,

Secara filosofis logis dapat dikatakan bahwa satu-satunya hal yang konstan didunia adalah perubahan. Perubahan lingkungan, alat, teknologi, prosedur kerja adalah berupa contoh dari bidang-bidang yang seharusnya selalu mendapat perhatian seorang pemimpin. Kesalahan tentang perubahan-perubahan itulah yang memungkinkan seorang pemimpin menjadi inovatif dan kreatif.

4. Kemampuan analitis,

Kemampuan menganalisa situasi yang dihadapi secara teliti, matang dan mantap adalah merupakan suatu persyaratan yang harus diterima untuk dapat mensukseskan kepemimpinan seseorang tersebut. Terutama apabila kemampuan itu dapat dikaitkan dengan super sistem dan sub sistem, maka yang selalu mempengaruhi didalam organisasi dimana organisasi yang dipimpinnya.

5. Memiliki daya ingat yang kuat,

Seorang pemimpin modern sering dan harus dihadapkan kepada informasi yang volumenya besar, dan ia juga dihadapkan kepada orang yang besar jumlahnya. Dengan daya ingat yang kuat diharapkan ia dapat menyaring hal-hal mana saja dan siapa yang perlu atau penting baginya didalam melaksanakan ataupun menjalankan tugasnya.

6. Ketrampilan berkomunikasi,

Dalam memberikan perintah, instruksi, petunjuk dan pedoman, seorang pemimpin harus menguasai teknik berkomunikasi. Dimana dalam hubungan ini perlu diperhatikan bahwa berkomunikasi bahwa merupakan kemampuan mempergunakan bahasa dengan baik dan sangat penting, untuk dapat kejelasan ide yang hendak disampaikan dan teknik penyampaian yang baik secara lisan maupun secara tertulis yang dilakukan dengan

- mempergunakan media bahasa.
7. Ketrampilan mendidik,
Seorang pemimpin dimana ia menjadi seorang atasan pada dasarnya adalah merupakan salah satu cara seorang pendidik. Pada kenyataannya menunjukkan bahwa seorang bawahan menghadapi kesulitan dalam pelaksanaan tugasnya, ia akan cenderung untuk pergi kepada atasannya, bukan saja untuk memperoleh petunjuk, akan tetapi juga untuk meminta pengarahan tentang cara melakukan tugasnya dengan baik.
 8. Rasionalitas dan objektivitas,
Jika dikatakan bahwa seorang yang emosional akan kurang berhasil sebagai seorang pemimpin. Artinya jika emosi merajai cara berfikir seseorang, maka rasionalitas dan objektivitasnya berkurang yang dapat mengakibatkan keputusan yang diambilnya menjadi kurang tepat.
 9. Pragmatis,
Membuat keputusan yang dapat dilakukan oleh aparat pelaksana sesuai dengan kemampuan dan sumbu yang tersedia dan yang menurut perhitungan akan merupakan suatu ciri yang dikehendaki oleh setiap pemimpin.
 10. Sederhana,
Jelas seorang pemimpin yang hendak memberi teladan kepada para bawahannya, kesederhanaan dalam cara hidup kiranya merupakan syarat mutlak untuk dipenuhi.
 11. Adanya Naluri untuk prioritas,
Berkaitan erat dengan pragmatisme adalah sifat yang dapat menentukan mana yang penting, kurang penting dan tidak penting. Dengan 'Sense of priorit' ini maka keputusan yang diberi akan mencerminkan sistem prioritas yang dianut. Hasilnya bahwa masalah penting akan mendapat perhatian dalam penjelasan terlebih dahulu.
 12. Keberanian
Semakin tingginya kedudukan seseorang di dalam organisasi atau kepemimpinannya didalam negara atau pemerintah semakin perlu pula ia harus memiliki keberanian dirinya dalam menghadapi semua masalah yang timbul, dengan alasan antara lain:
 - Meskipun stafnya lebih banyak oleh karena jumlah orang yang sungguh-sungguh dapat diajak berkomunikasi dalam proses pengambilan keputusan akan menjadi lebih kecil, diperlukan keberanian.
 - Beban pengambilan keputusan menjadi lebih berat baik dalam arti kualitas maupun kuantitas.
 - Meneiliti proses pengambilan keputusan resiko kiranya masih akan timbul -dalam pelaksanaan karena tidak ada seorangpun dapat meramal masa depan dengan selalu tepat.
 - Keputusan yang pasti tidak selalu memuaskan semua pihak.
 13. Kemampuan mendengar,
Sering terjadi bahwa semakin tinggi kedudukan seseorang kecenderungan untuk lupa semakin besar pula. Padahal salah satu sifat yang perlu dimiliki setiap orang yang menduduki jabatan pimpinan adalah kemampuan mendengar orang lain terutama para bawahan, karena dengan mendengar tersut maka bagi bawahan dapat mencermati dan melaksanakannya tugas.
 14. Ketegasan
Ketegasan di dalam menghadapi bawahannya dan menghadapi ketidakketentuan sangat penting. Karena ketegasan itu diperlukan dalam usaha menjamin stabilitas yang dimana bagi organisasi meskipun dihadapkan kepada masa depan yang arahnya mungkin kurang jelas diketahui.

Partisipasi

Partisipasi merupakan sub sistem yang amat potensial dalam pelaksanaan pembangunan khususnya dari masyarakat.

Perhatian yang seksama dari kalangan pelaksana pembangunan terhadap partisipasi ini dapat mencapai sasaran seperti yang digarapkan setiap derap pembangunan. Keikutsertaan masyarakat dalam setiap kegiatan pembangunan merupakan suatu elemen yang perlu diragukan lagi apabila pembangunan tersebut benar-benar diharapkan hasilnya. Partisipasi masyarakat tidak lain adalah keikutsertaan semua lapisan masyarakat ke dalam setiap program pembangunan yang hendak dilaksanakan baik secara aktif ataupun pasif.

Menurut pendapat Taliziduhu Ndaha (2012: 4) tentang pengertian partisipasi yaitu: "Partisipasi merupakan keterlibatan nyata orang-orang dalam proses pembuatan keputusan mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya, serta dapat diartikan sebagai keterlibatan mereka dalam menjalankan program dan keputusannya.

Pendapat di atas ini menekankan bahwa setiap orang harus terlibat langsung didalam kegiatan-kegiatan pembangunan yang sedang dijalankannya atau dilaksanakan, baik yang menyangkut dengan program pelaksanaan maupun dalam membuat keputusan. Jadi harus ada satu suatu partisipasi aktif dari pada masyarakat agar pembangunan yang dilaksanakan dapat berhasil seperti yang diharapkan. Partisipasi masyarakat sangat diperlukan di dalam pembangunan karena:

1. Masyarakat itu sendiri yang paling tahu/memahami apa yang mereka perlukan dan tahu bagaimana mencapai tujuan tersebut. Yang artinya melibatkan masyarakat dalam membuat keputusan sehingga masyarakat dapat menerima keputusan tersebut,
2. Masyarakat mempunyai hak untuk ikut serta. Yang artinya bahwa menyalurkan suara masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan,

Meningkatkan rasa kebersamaan dengan mengajak masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Yang artinya adalah setiap masyarakat punya kabutuhan sosial untuk dipenuhi, yaitu kebutuhan ikut serta (Seuse of Participation).

Masyarakat

Pengertian terhadap masyarakat dalam kehidupan sehari-hari adalah sejumlah penduduk/kelompok atau orang-orang/individu yang mendiami suatu wilayah baik dalam jumlah yang besar maupun dalam jumlah yang kecil jadi untuk suatu wilayah/daerah yang luas ataupun wilayah/daerah yang sempit. Menurut cara terbentuknya masyarakat dapat dibagikan dalam dua corak yaitu masyarakat alamiah dan masyarakat budi daya, masyarakat alamiah adalah masyarakat yang terjadi karena kehendak alam seperti suku, kaum atau keturunan yang menetap dan mempunyai tujuan yang sama dalam wilayah yang cukup lama. Menurut pendapat Hassan Shadly (2012: 48), mendefenisikan masyarakat yaitu: "Golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia yang dengan atau sendirinya bertalian dengan golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain". Jadi masyarakat menurut pendapat lain yaitu Koentjaraningrat (2013: 143), adalah "Kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut adat istiadat tertentu yang bersifat kontinue dan yang terkait oleh suatu rasa indentitas bersama".

Dari uraian-uraian tersebut, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa masyarakat adalah sejumlah penduduk yang bertempat tinggal secara bersatu padu dalam suatu wilayah yang saling pengaruh mempengaruhi dalam tata kehidupan seperti melaksanakan pembangunan dan dalam berbagai aktifitas sosial lainnya.

Pembangunan

Pengertian Pembangunan disini menurut pendapat Peter Hagul (2012: 2), adalah: "Pembangunan merupakan suatu perubahan yang berlangsung secara luas didalam masyarakat, bukan hanya sekedar

perubahan pada sektor ekonomi saja, tetapi perubahan juga pada grafik tenaga kerja, agar ia mencakup masalah ekonomi dan politik dimana masalah tersebut saling berhubungan". Dari kutipan ini dapat dijelaskan bahwa pembangunan merupakan perubahan yang dilakukan ditengah-tengah masyarakat luas yang meliputi segala aspek dalam kehidupan manusia yang saling keterkaitan antara satu kepentingan dengan kepentingan lainnya, seperti antara ekonomi dan sosial, politik dan pembangunan yang kesemuanya itu berada dalam satu ruang lingkup secara nasional. Untuk itu pembangunan merupakan suatu usaha dimana untuk membantu dan mendorong masyarakatnya agar dapat membangun berbagai fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam masyarakat.

Hal ini sangat penting dalam mengisi dan meletakkan dasar-dasar bagi pertumbuhan pembangunan perekonomian rakyat Indonesia. Kebijakan pembangunan merupakan suatu proses yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Segi positif yang terdapat di gampong yang dapat dikembangkan dalam rangka pelaksanaan pembangunan adalah merupakan jiwa gotong royong dari masyarakat, musyawarah dan semangat kerja yang didorong oleh rasa kekeluargaan.

Sasaran utama pembangunan gampong adalah tercapainya landasan yang kuat bagi masyarakat gampong untuk tumbuh dan berkembangnya kemajuan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat gampong dengan atas kekuatannya sendiri. Oleh karena itu maka cara pelaksanaan pembangunan pada setiap kesempatan selalu dianjurkan supaya ditekankan perlu adanya partisipasi masyarakat demi keberhasilan suatu program pembangunan yang akan dilaksanakan.

Partisipasi satu pihak saja tidak

banyak artinya, namun yang terpenting adalah bagaimana caranya supaya terlaksananya partisipasi tersebut dari kedua pihak dan bisa berjalan dalam pengelolaan serta penyelenggaraan pembangunan ditingkat Kecamatan dan gampong-gampong yang diperlukan dapat teratasi. Di Indonesia pembangunan merupakan amanat konstitusi yang harus dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan Nasional, perkataan pembangunan berasal dari kata dasar "*bangun*" yang artinya bangkit berdiri.

Pengertian pembangunan sebagaimana yang didefinisikan oleh Sondang P. Siagian (2014: 2), adalah suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan berencana yang dilaksanakan secara sadar dan berencana oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa

3. Metodologi Penelitian

Dalam melakukan penelitian guna memperoleh data yang kongkrit dan keterangan untuk bahan penyusunan skripsi ini, maka penulis menggunakan metode deskriptif, sebagaimana yang ditulis oleh Winarno Surachmat (2013: 29) adalah: Metode deskriptif adalah menuturkan dan menafsirkan data yang ada misalnya tentang situasi yang dialami suatu hubungan, kegiatan pandangan yang nampak atau tentang suatu proses yang sedang berlangsung, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang nampak, pertentangan yang runcing dan sebagainya.

4. Pembahasan

Sebagaimana yang telah penulis kemukakan sebelumnya bahwa penelitian ini diambil di Kecamatan Gempang, yang mana Kecamatan Geumpang terdiri dari 5 (lima) Gampong Masing- masing :

1. Gampong Bangkeh
2. Gampong Puloloh
3. Gampong Leupu

4. Gampong Keune

5. Gampong Pucok

Dari kelima Gampong dalam Kecamatan Gumpang semuanya penulis ambil untuk lokasi penelitian.

a. Gampong Bangkeh

Gampong Bangkeh merupakan salah satu Gampong dalam Kecamatan Gumpang Kabupaten Pidie yang dipimpin oleh seorang Keuchik, Imum Meunasah dan seorang Sekretaris Gampong. Jumlah Penduduk Gampong Bangkeh, 612 jiwa yang terdiri dari laki-laki 268 jiwa dan Perempuan 344 jiwa dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 126 KK. Mata Pencaharian Penduduk Gampong Bangkeh rata-rata hidup dari sektor pertanian dan buruh tani. dengan luas wilayah 30,5 Ha yang terdiri dari:

1. Luas pemukiman 14 Ha,
2. Luas persawahan 10 Ha,
3. Luas perkebunan 5 Ha,
4. Luas Kuburan 0,3 Ha,
5. Luas pekarangan 5 Ha,
6. Luas Prasarana umum lainnya 2 Ha.

Gampong Bangkeh adalah terdiri dari 4 Dusun yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Dusun Tgk Chik Ditiro
2. Dusun Lhok Kuala
3. Dusun Cot Batu
4. Dusun DKI.

Dalam konteks peningkatan pendapatan masyarakat gampong di Gampong Bangkeh adalah dapat memungkinkan bagi pengembangan dan peningkatan usaha yang menggunakan areal yang luas dibidang pertanian dan perkebunan. Masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri dan sektor lainnya tidak dominan, ini mengartikan bahwa sebagai besar warga masyarakat Gampong Bangkeh lebih mengandalkan sebagai petani dan perkebunan.

Secara umum bahwa masyarakat Gampong Bangkeh lebih memiliki

kegiatan/sumber mata pencarian yang cukup variatif misalnya petani pemilik sawah akan bekerja Tukang Kayu, Tukang Batu dan lain-lain

Pelaksanaan pembangunan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk pembaharuan, dengan adanya berbagai pembangunan yang dilakukan di suatu daerah diharapkan daerah tersebut akan lebih maju dan berkembang. Begitu juga halnya dengan pelaksanaan pembangunan di Gampong Bangkeh, Berbagai kegiatan pembangunan telah dilakukan baik pembangunan fisik maupun non fisik yang semuanya itu untuk mensejahterakan masyarakat.

5. Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

Peranan Camat sebagai administrator guna dalam rangka pencapaian peningkatan pembangunan di Kecamatan Gumpang yang belum terlaksana sebagaimana mestinya dikarenakan ditemui berbagai faktor penghambat atau kendala sehingga program pembangunan belum bisa berjalan sebagaimana yang diharapkan.

Hambatan yang ditemui antara lain adalah Camat kurang menggunakan jalur informal dalam menyampaikan informasi dan inovasi pembangunan, masyarakat kurang dimintai pendapat-pendapat dalam pelaksanaan pembangunan dan tingkat kesadaran masyarakat untuk membangun masih rendah, akibatnya walaupun komunikasi yang dilaksanakan oleh Camat baik, tetapi partisipasi masyarakat dalam membangun terutama partisipasi aktif yang bersifat peningkatan swadaya relatif rendah.

Hal-hal yang dapat dilakukan hendaknya perlu diberikan berbagai penyuluhan kepada masyarakat agar mereka lebih berpartisipasi dalam pelaksanaan terutama partisipasi aktif, Camat hendaknya lebih banyak memberikan perhatian terhadap proses pelaksanaan pembangunan supaya pembangunan yang dilaksanakan lebih

berdaya guna dan berhasil guna.
Saran :

Didalam rangka peningkatan pembangunan, partisipasi masyarakat terhadap pembangunan hendaknya lebih meningkatkan teknik dan bentuk komunikasi yang digunakan oleh Camat, disamping menggunakan jalur birokrasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Perundang-undangan, juga hendaknya menggunakan jalur informal dalam menyampaikan informasi dan inovasi pembangunan kepada masyarakat,

Dalam setiap pertemuan-pertemuan yang dilakukan, berkenaan dengan pembangunan yang akan dicapai, hendaknya Camat lebih mendengarkan inspirasi dan aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, Perlunya melakukan usaha - usaha agar lembaga - lembaga sosial yang ada dalam masyarakat dapat difungsikan dengan sepenuhnya demi kepentingan masyarakat sendiri.

Daftar Pustaka

- Awaluddin, A., & Zulfikar, Z. (2022). KUALITAS PELAYANAN PADA PEUSAHAAN UMUM DAERAH TIRTA MON KRUENG BARO KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Sains Riset*, 12(2), 285-291. Bayu Suryaningrat (2010), *Wewenang, Tugas dan Kewajiban Camat*, Susunan, Jakarta.
- Effendi, Onong Uchyana (2010), *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung.
- Handayaningrat, Soewarno (2010), *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*, Gunung Agung, Jakarta.
- Pamuji (2010), *Pembinaan Perkantoran di Indonesia*, PT.Ihktiar Baru Van Hove, Jakarta.
- Syafiie, Kencana Inu (2011), *Sistem Administrasi Negara Republik Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Hassan Shadily (2004), *Sosiologi Sustu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta
- Humayra, N., & Zulfikar, Z. (2023). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENERAPAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (BKPSDM) KABUPATEN PIDIE. *Jurnal Administrasi dan Sosial Sains*, 2(1).
- I.Nyoman Beratha (2000), *Desa Masyarakat Desa dan Pembangunan Desa*, Ghalia Indonesia, Jakarta
- Onong Udiyani Effendi (2001) *Hubungan Masyarakat Suatu studi Komunikasiologi*, Rajawali Karya, Bandung
- Risdiyanti (2001), *Fungsi Pemerintah Daerah dalam Pembuatan Perda*, Bina Aksara, Jakarta
- Sondang P.Siagian (2002), *Administrasi Pembangunan*, CV. Rajawali, Jakarta
- Sumber Saparin (2002), *Komunikasi Massa*, Gunung Agung Jakarta
- Peter Hagul (2002), *Pembangunan Desa dan Lembaga Swadaya Masyarakat*, CV Rajawali, Jakarta
- Taliziduhu Ndara (2001), *Pembangunan masyarakat Tinggal Landas*, CV Rajawali, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh hh